

PENINGKATAN PERENCANAAN PORTAL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Habieb Amar Pambudi

NPP. 29.1975

Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: habiebp22@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Digital development is a phenomenon that cannot be avoided. Although the definition of digital development has not been specifically agreed upon by researchers, almost all activities carried out by the people have been transferred to digital media processes. **Purpose:** Processes or activities that are usually done physically are drastically reduced. The pressure to switch to media so that the digital processes atau activities can continue to run during this pandemic is increasing. The government really needs a change or transformation of government for the better, especially in today's digital era. Data collection is a process of procuring primary data for research purposes. Data collection is a very important step in the scientific method, because in general the data collected is used, except for exploratory research, to test the work hypotheses that have been proposed. **Method:** Data collection techniques are systematic and standard procedures to obtain the required data. In general, data collection can be divided into several groups, namely: 1. Practice (observation) 2. Interviews 3. Documentation of Implementation Activities at the Communication and Information Office of Bulungan Regency with coordination carried out with the Head of the Service. **Result:** that digital development is inevitable if the organization wants to survive and compete. The rapid development of technology in the future causes digital development to be handled wisely. **Conclusion:** Organizations must prepare themselves well and the application of digital developments must be in line with the strategy owned by the organization. Strategies that are being and will be carried out when carrying out digital developments must be adjusted, for example the use of social media and also the website (PPID portal). This means that the organization must rethink existing strategies to adapt to the changes that will be implemented

Keywords: Digital Development, PPID Portal

ABSTRAK

Permasalahan /Latar Belakang (GAP): Perkembangan digital merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Meskipun pengertian perkembangan digital secara spesifik belum disepakati oleh para peneliti, hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia dialihkan ke proses media digital. **Tujuan:** Proses atau kegiatan yang biasanya dilakukan secara fisik berkurang drastis. tekanan untuk beralih ke media agar proses atau kegiatan digital dapat terus berjalan terus bertahan selama pandemi ini semakin meningkat. Pemerintahan sangat membutuhkan namanya perubahan atau transformasi pemerintahan ke arah yang lebih baik, apalagi di era sekarang yang serba digital. Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data sangatlah penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis kerja yang telah diajukan. **Metode:** Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum, pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok yaitu : 1. Praktek (observasi) 2. Wawancara 3. Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bulungan dengan koordinasi yang dilakukan bersama Kepala Dinas. **Hasil:** perkembangan digital merupakan hal yang tidak terelakkan bila organisasi tersebut mau tetap hidup dan bersaing. Perkembangan teknologi yang demikian cepat di masa-masa mendatang menyebabkan perkembangan digital harus disikapi dengan bijak. **Kesimpulan:** Organisasi harus mempersiapkan diri dengan baik dan penerapan perkembangan digital harus sejalan dengan strategi yang dimiliki oleh organisasi. Strategi-strategi yang sedang dan akan dilakukan saat melakukan perkembangan digital harus disesuaikan contohnya pemanfaatan media sosial dan juga website (portal PPID). Artinya, organisasi harus memikirkan kembali strategi yang sudah ada untuk disesuaikan dengan perubahan yang akan dilaksanakan

Kata kunci: Perkembangan Digital, Portal PPID

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kegiatan mengenai semua tentang pemrosesan, penyampaian dan pengelolaan atau pemindahan informasi dari sarana atau media satu dengan lainnya. Di Indonesia sendiri indeks pembangunan TIK sudah mulai berkembang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tentunya membuat penyampaian informasi dan pesan menjadi lebih mudah. TIK membuat jarak antar pulau yang memisahkan bukan lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi bahkan mampu ditampilkan secara visual, contohnya saja berbagai aplikasi yang sering dipakai saat ini seperti e-banking, e-learning, e-library, e-mail, dan e-laboratory.

Pada tahun 2020, perkembangan TIK di Indonesia merupakan perkembangan yang paling pesat, hal ini dikarenakan kegunaannya yang semakin beragam, TIK terbagi menjadi dua aspek yaitu teknologi informasi serta teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal berkaitan dengan proses, manipulasi dan pengelolaan informasi, serta penggunaan sebagai alat bantu sedangkan teknologi komunikasi merupakan penggunaan alat bantu itu sendiri dan berguna untuk memproses serta mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi manusia tidak dapat menghindari dari perkembangan TIK itu sendiri, dan tentunya hal ini dikarenakan kegunaan TIK yang kini terus berkembang membuat dan menjadikan beberapa kemudahan bagi penggunaannya dengan beragamnya pelayanan yang dapat diberikan.

Dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penggunaan TIK oleh pemerintah adalah sebutan lain dari Electronic Government (e-Government) yang berarti memanfaatkan sebuah inovasi data yang dapat meningkatkan dan membantu pengolahan pelayanan publik yang diberikan, serta menghubungkan antara pemerintah dengan mitra bekerja sama yang berbeda-beda. Salah satu bentuk pemanfaatan e-Government terhadap penggunaan TIK dalam keterbukaan informasi adalah melalui website dan bisa juga melalui aplikasi android. Contohnya saja portal Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID), portal PPID itu sendiri adalah portal web yang dikhususkan dalam memberikan pelayanan informasi publik. Namun, pada kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh portal PPID ini ternyata masih mengalami berbagai kendala seperti kekurangannya tenaga ahli ataupun aparatur yang paham akan teknologi, sistem informasi yang digunakan juga perlu diperbaiki, serta halaman website yang perlu ditingkatkan dan ketepatan dalam membagikan informasi sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam masyarakat.

Portal PPID dalam melaksanakan tugas serta fungsinya tentu akan bersinggungan dengan berbagai bidang seperti hukum dan TIK, sehingga hal itu menuntut akan adanya pelayanan informasi yang kaya akan sudut pandang dan tentunya juga kekinian. Di Diskominfo Kabupaten Bulungan sendiri, portal PPID dalam pelayanan publik perlu akan adanya peningkatan dan perbaikan dalam hal mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta portal website yang masih sering ditemukan error seperti tombol untuk ganti halaman atau mengunduh berkas yang diinginkan yang tidak merespon. Dalam menerapkan portal PPID ini tentunya harus disusun dengan matang terkait perencanaannya untuk menghadapi situasi yang kini terus berubah-ubah, serta kendala-kendala yang dapat mengganggu pelayan ini berjalan dengan baik kedepannya. Alasan dikembangkannya portal PPID ini yakni agar membangun pelayanan publik ke tingkat yang lebih tinggi dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat termasuk generasi muda sebagai agen perubahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan program portal PPID di Kabupaten Bulungan ini. Portal PPID ini ternyata masih mengalami berbagai kendala seperti kekurangannya tenaga ahli ataupun aparatur yang paham akan teknologi, sistem informasi yang digunakan juga perlu diperbaiki, serta halaman website yang perlu ditingkatkan dan ketepatan dalam membagikan informasi sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa banyaknya yang perlu kembali diperhatikan oleh pihak Diskominfo untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kedepannya. Dalam mengembangkan suatu program seperti portal PPID ini membutuhkan tindakan yang cepat serta tahapan evaluasi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya pelayanan digital tersebut juga menjadi permasalahan berikutnya, sudah menjadi keharusan bagi Diskominfo untuk mempublikasikan segala pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat kemudian merasakan perubahan pelayanan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini juga menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat dalam memperhatikan kegiatan pemerintahan disekitarnya. Namun hal ini tentunya akan menjadi bahan kepada Diskominfo sendiri dalam menghadapi masyarakatnya sehingga melalui informasi yang dibagikan oleh pihak pemerintah sendiri dapat menjadi manfaat kepada masyarakat.

1.3. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peningkatan perencanaan portal PPID dalam pelayanan publik Diskominfo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

II. METODE

Penyusunan rencana dalam penelitian guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti merupakan arti dari pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka, permasalahan yang diteliti juga cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut harus diolah dengan lebih alamiah yakni dengan cara interview langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Data penelitian yang harus dicapai ada tiga yaitu valid, objektif dan reliable, selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, hipotesis kerja, menemukan pola, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Diskominfo, Kepala Bidang Pelayanan informasi publik, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Staff Pengelola Data dan Informasi, dan masyarakat. Adapun analisis penelitian ini menggunakan teori E-Government yang digagas oleh Indrajit (Indrajit, 2016) yang mempunyai 3 dimensi yaitu support, cappacity, dan value.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan analisis menurut tujuan penelitian yang ingin di peroleh dalam penelitian, berikut merupakan hasil analisis dari data dan fakta yang ada di lapangan dengan prespektif legalistik dan teoritis yang akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengidentifikasi penerapan Portal PPID sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan.

3.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan Secara Teoritis

Peneliti Untuk mengetahui Penerapan Portal PPID dalam Pelayanan Informasi Publik Oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan peneliti menggunakan teori E-Goverment yang dikutip Indrajit dalam bukunya "Electronic Goverment" yang meliputi: (1) Support merupakan kebijakan yang telah disepakati oleh pemegang kekuasaan publik dan dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. (2) Cappacity yaitu Human Resorce (SDM), sumber daya anggaran, dan sumber daya fisik yang dapat mendukung kelancaraan pelaksanaan suatu program. (3) Value adalah akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat dipisahkan dari nilai atau kuantitas manfaat yang didapatkan. Kebijakan e-government tentunya memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku sebagai pelaksana.

3.2 Support

Elemen Pertama dan merupakan factor utama yang penting yang harus dimiliki pemerintah dalam pengembangan E-Government itu sendiri yaitu Support. Disini peneliti membagi support menjadi 3 bagian yaitu Aturan dan Kebijakan Pemerintah, Partisipasi Pemerintah dan Sosialisasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Aturan dan Kebijakan Pemerintah

Dalam pengembangan e-government diperlukan aspek penting yang menjadi salah satu awal dari inisiatif pengembangan e-government yaitu standar yang telah disepakati oleh pemegang kekuasaan publik dan dilaksanakan dengan cara yang mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kebijakan yang mendasari pembangunan e-government tersebut di mulai dari UUD 1945 pasal 28F yang menjelaskan tentang hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan mengelola informasi . Kemudian untuk memperjelas regulasi sebelumnya, UU No 14 tahun 2008 dibuat, guna menjelaskan lebih detail tentang keterbukaan informasi publik apa saja yang disediakan oleh umum, jenis-jenisnya, dan beberapa hal lainnya.

Pemerintah tidak hanya mengatur informasi publik saja, namun juga pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah UU yang membahas tentang pelayanan publik, terkhusus di jelaskan di pasal 4 huruf (h) yang membahas keterbukaan yang dimuat dalam asas penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan dalam hal pelayanan publik wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 yang membahas secara rinci tentang pengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan publik.

Kebijakan tersebut dirumuskan dan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan kedalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Dalam regulasi tersebut di jelaskan seputar aturan yang mengatur PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), Informasi yang dibatasi , dan beberapa hal lainnya. Untuk masalah pelayanan publik sebenarnya Diskominfo sudah melaksanakannya termasuk dalam penyebaran informasi publik, dan penerapan e-gov sesuai dengan regulasi yang ada, namun disayangkan bahwa penerapannya masih kurang maksimal, terutama dalam masalah penerapan e-government.

2. Partisipasi Pemerintah

Diskominfo Kabupaten Bulungan dalam menerapkan e-government dalam pelayanan informasi publik, tentu di dukung oleh pihak pemerintah Kabupaten Bulungan. Dapat terlihat dari adanya kesepakatan dalam membentuk e-government yang menghasilkan regulasi hukum yang mengatur seputar e-government dalam pelayanan informasi publik, sumber daya yang mendukung mensukseskan konsep e-governmnet tersebut, dan penerapannya. Diskominfo memiliki yang namanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan yang di atur dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

Penjabaran teknis pengelolaan PPID Kabupaten dan OPD tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Untuk PPID Utama Kabupaten bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (PPID Pembantu) yang meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- b. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit atau satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing unit atau satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) atau permohonan.

Tim Pertimbangan dalam PPID Utama yang terdiri Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bulungan) mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, diantara tugas dan fungsi Tim Pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan memberikan Jawaban atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik secara tertulis;
- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi publik tertentu yang dikecualikan di lingkungan badan publik;
- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan badan publik;
- d. Menghadiri atau menunjuk kuasanya berdasarkan kuasa khusus dalam sidang penyelesaian sengketa serta gugatan ke PTUN dan MA.

Salah satu penunjang keberhasilan dari kinerja pegawai dalam sebuah organisasi yaitu tersedianya sumber daya yang bagus dan memadai. Dengan kata lain meskipun dengan perencanaan yang matang namun jika tidak didukung dengan fasilitas yang mendukung efektivitas dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat mencapai tingkat yang maksimal. Pengelolaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi dan dokumentasi publik, terdiri dari:

- a. Ruang Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi secara langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:
 - 1) 4 kursi tamu
 - 2) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - 3) 2 unit Personal komputer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - 4) 2 unit telepon
 - 5) 2 lemari arsip
 - 6) 1 filling cabinet
- b. Portal atau website Dinas Komunikasi dan Informatika Bulungan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://kominfo.bulungan.go.id/wp/>.

- c. Portal atau website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bulungan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat selaku pemohon informasi melalui laman <http://ppidbulungan.com/>.
- d. Aplikasi “Pantau Bulungan” dimana aplikasi ini merupakan pelayanan publik berbasis online yang telah di update dengan sebuah sistem terbaru dengan menggunakan metode 6 berita utama yang akan tampil dalam halaman utama.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui portal PPID dan Pantau Bulungan dapat menerima masukan (feedback) langsung dan dari masyarakat sebagai pengguna aplikasi sekaligus pemohon informasi terkait pelayanan informasi yang diberikan agar dapat menjadi rekomendasi dan masukan untuk dapat terus berkembang dan memperbaiki pelayanan dalam segala aspek demi terwujudnya Pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Manfaat portal PPID dan Pantau Bulungan sendiri dinilai sudah efektif, terlihat dari fungsinya yang telah mengakomodir pengajuan keberatan informasi untuk kemudian disampaikan kepada atasan PPID, hingga pengajuan sengketa informasi yang secara otomatis akan disambungkan dari sistem aplikasi Pantau Bulungan ke Bidang layanan sistem komunikasi dan informasi publik untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya di tindaklanjuti.

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bukti kepedulian pemerintah dalam membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk sarana dan prasarana termasuk e-government. Sarana dan prasarana yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk fisik namun termasuk dalam jaringan seperti internet dan server. Untuk masalah infrastruktur, Diskominfo sekarang sudah cukup memiliki sarana dan prasana yang di butuhkan dalam menjalankan tupoksinya, namun ini masih belum lengkap, sehingga perlu di tingkatkan lagi. Contohnya pengadaan server secara mandiri, internet yang menjangkau berbagai tempat, dan laptop yang memadai. Permasalahan anggaran belum memadai, memaksa mereka untuk memanfaatkan saja apa yang ada. Jadi Diskominfo masih sangat membutuhkan Infrastruktur yang memadai. Server atau database yang digunakan Diskominfo selama ini masih ikut dengan tempat server perusahaan lain di Jakarta, ini dikarenakan Diskominfo masih belum bisa memelihara sendiri terkendala dengan anggaran.

3. Sosialisasi

Dalam penyebaran informasi publik , tentu saja perlu sangat diperlukan adanya kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari melakukan sosialisasi ini adalah sebagai sarana penyebarluasan atas informasi yang ingin disampaikan atau informasi yang wajib untuk di ketahui oleh masyarakat. Jika membahas tentang sosialisasi , Diskominfo sudah melakukan hal tersebut, karena itu merupakan salah tugas dari Diskominfo, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Seperti yang kita tahu sekarang kita di landa oleh Covid-19, yang akhirnya kegiatan langsung turun di lapangan harus di batasi termasuk sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Oleh sebab itu pihak Diskominfo memaksimal sosialisasi secara online, seperti mengupdate kegiatan dan informasi seputar pemerintahan di website Kabupaten Bulungan atau di media sosial Kabupaten Bulungan.

Masyarakat pedalaman terkendala dengan masalah jaringan yang tidak memadai, namun masih ada alternative berupa baleho atau majalah yang dibuat oleh tim redaksi, walaupun ada sedikit terlambat dalam penyampaian berita. Pihak Diskominfo sudah melaksanakan yang namanya sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Website dan Media sosial merupakan contoh penyebaran informasi publik secara online, sedangkan baleho dan majalah merupakan penyebaran informasi secara offline atau tidak langsung.

Sosialisasi pada umumnya sudah dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini. Dalam tabel ini di jelaskan bahwa semua daerah yang termasuk dalam kabupaten bulungan sudah menerima yang namanya layanan informasi publik. Layanan informasi publik tersebut berupa brosur, majalah reguler, buku eksklusif, atau layanan informasi yang berupa online seperti website dan aplikasi.

Portal PPID adalah salah satu contoh dari layanan informasi publik yang bertujuan sosialisasi oleh pihak Diskominfo Kabupaten Bulungan secara online. Dapat dilihat dari brosur online, pihak pemerintah kabupaten bulungan yang di fasilitasi oleh Diskominfo, menyebarkan informasi tentang Pelayanan Vaksinasi Covid-19, yang akan di laksanakan pada Jumat 1 April 2022 di Pos Dinkes Kabupaten Bulungan. Dari brosur tersebut di jelaskan vaksin apa saja yang tersedia, dana apa saja syarat yang harus di penuhi untuk dapat ikut dalam kegiatan vaksinasi tersebut. Tentu saja, kegiatan ini mengundang semua masyarakat secara umum yang belum melaksanakan vaksinasi.

3.3 Cappacity

Elemen kedua ini merupakan alat untuk mensukseskan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan e-government. Ada 3 hal yang menjadi indikator dari elemen ini yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang cukup memiliki kompetensi dan kemampuan yang di butuhkan, ketersediaan sumber daya yang cukup terutama di bidang financial, dan ketersediaan infrastruktur teknologi untuk mensukseskan dalam penerapan e-government. Untuk lebih detailnya, akan dibahas sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai atau juga bisa disebut dengan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mensukseskan e-government dalam pelayanan informasi publik di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bulungan. Pegawai yang dimaksud merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan skill yang dibutuhkan dalam penerapan e-government tersebut. Namun fakta di lapangan yang terjadi , pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi masih di bilang cukup kurang.

Kepala Bidang Layanan Sistem Komunikasi Dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan pada tanggal 13 Januari 2022 membahas tentang hal ini Terkait dengan sumber daya manusia, dari Diskominfo sendiri kalau untuk sekedar pekerjaan sehari-hari masih dirasa cukup walaupun sebenarnya masih dipaksakan. Diskominfo berharap adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang di butuhkan. Perlu di tekankan bahwa sumber daya manusia yang di butuhkan merupakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang di butuhkan dalam membantu tupoksi dalam Diskominfo dan menghindari suatu permasalahan yaitu penempatan yang salah.

Diskominfo Kabupaten Bulungan masih membutuhkan yang namanya sumber daya manusia, namun perlu di garis bawahi yang di butuhkan merupakan sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat membantu dalam tupoksi Diskominfo Kabupaten Bulungan, termasuk dalam penerapan e-government sebagai pelayanan informasi publik. Jika hal ini sudah terwujud maka perlu

namanya penempatan yang sesuai dengan kebutuhan hal dikarenakan akan kurang baik rasanya jika terdapat pegawai yang tepat namun tidak digunakan dengan tepat.

2. Sumber Daya Keuangan

Dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan mendapatkan alokasi anggaran yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dalam bidang layanan informasi publik Kabupten Bulungan ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pemberian anggaran, diskominfo menganggap masalah utama yang ada dengan keuangan memang sudah ada. Apalagi sekarang anggaran juga terbagi lagi untuk membantu penanganan pandemic covid. Dengan hal ini terjadi Diskominfo hanya bisa memaksimalkan tupoksi yang ada sesuai dengan anggaran yang ada. Diskominfo sangat membutuhkan yang namanya sumber daya financial. Namun karena terkendala keterbatasan anggaran, Diskominfo terpaksa untuk mendahulukan kepentingan yang mampu untuk dipenuhi terlebih dahulu, dan bertahan dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk program sehari-hari. Salah satu alasan anggaran itu berkurang karena Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengaturan anggaran dalam penanganan Covid-19

3. Infrastruktur Jaringan

Faktor ketiga dalam mendukung mewujudkan e-government dalam pelayanan informasi publik yaitu sumber daya peralatan atau Infrastruktur Suatu program tidak akan berjalan jika tidak memiliki alat untuk menjalankan program tersebut. Infrastruktur yang dimaksud dalam hal ini bisa dalam bentuk fisik atau non fisik.

Diskominfo sudah memiliki koneksi internet yang menggunakan provider internet dari Indihome yang stabil di gunakan untuk 3-8 orang yaitu 20 Mbps, jika ingin di gunakan untuk lebih banyak orang, akan lebih baik di tingkatkan Bandwith internet tersebut. Performa Koneksi LAN yang digunakan oleh Diskominfo termasuk golongan lancar, yang dimana Hardware hingga Software dapat terkoneksi dengan sinergi lewat jaringan lokal antar komputer. Infrastruktur yang ada di Diskominfo Kabupaten Bulungan, masih kurang namun untuk pekerjaan sehari-hari itu sudah cukup. Diskominfo kabupaten bulungan dalam beberapa tahun ini ada target untuk mengembangkan Diskominfo lebih lanjut salah satunya yaitu evaluasi SPBE. Untuk menunjang hal tersebut butuh yang namanya infrastruktur jaringan yang mendukung, seperti bandwith internet yang besar dan stabil, LAN yang dapat menghubungkan jaringan lokal antar komputer, dan hal-hal lainnya. Untuk penyebaran jaringan itu sendiri masih terdapat beberapa daerah yang mengalami blank spot dikarenakan kondisi geografis yang tidak mendukung dan Faktor cuaca yang buruk, oleh sebab itu perlunya integrasi jaringan yang didukung dengan penyediaan internet, BTS (Base Transceiver Station), dan Backbone Fiber. Tidak hanya itu saja, Data Center dari Diskominfo itu sendiri tidak semua dipegang mandiri namun masih menggunakan jasa penyedia layanan.

3.4 Value

Elemen Pertama dan kedua adalah 2 aspek yang dipandang dari sisi pemerintahan. Pelaksanaan suatu ketentuan-ketentuan tidak terlepas dari kuantitas manfaat yang diperoleh. Dalam penerimaan besar tidaknya manfaat atau nilai yang diperoleh, tentu bukan pemerintah sendiri yang menentukan tapi juga masyarakat yang menikmati dan menerima hal tersebut. Kebijakan e-government tentunya memiliki manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaku sebagai pelaksana. Oleh

sebab itu pemerintah harus teliti dalam memilih dan menggunakan aplikasi apa dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dalam penerapan e-government sebagai pelayanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Bulungan, memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Dengan adanya website kabupaten dan aplikasi berbasis mobile, masyarakat dapat mengikuti dan update seputar tentang informasi pemerintahan dan lingkungan pemerintahan. Masyarakat juga dapat memberikan kritik dan saran melalui website dan aplikasi pantau bulungan di kolom komentar atau saran.

Masyarakat sudah merasakan manfaat dari pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Bulungan sehingga mengetahui perkembangan pemerintah secara transparansi dan akuntabel. Namun ada juga yang masih belum tau seputar aplikasi atau website layanan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan, oleh sebab itu perlu disebarnya informasi seputar layanan informasi publik yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bulungan. Tidak hanya masyarakat saja yang mendapatkan manfaat namun pemerintah juga. Dengan pelayanan informasi publik secara online, pemerintah dapat lebih hemat biaya, hemat waktu, dan tenaga, sehingga dapat fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu dari pelayanan tersebut. Diskominfo sudah memaksimalkan segala upaya untuk melakukan yang namanya penyebaran informasi terhadap publik. Namun dalam pemberian manfaatnya, masih ada pihak masyarakat yang belum peduli terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dari hal tersebut peneliti berpendapat, kembali lagi kemasyarakat, mau menerima peduli terhadap perkembangan itu atautkah tetap menjadi tidak peduli.

3.5 Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah, karena publik menyoroti kinerja pemerintah saat ini. Untuk melihat bagaimana penerapan pelayanan digital pada Diskominfo Kabupaten Bulungan dan capaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan anggaran yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu instansi atau lembaga pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang ditunjukkan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa Penerapan e-government dalam pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Diskominfo Kabupaten Bulungan sudah mengaplikasikan e-government sebagai pelayanan informasi publik baik dari segi aturan yang mengatur, partisipasi dengan pemerintah dalam mengemban e-government, sampai dengan sosialisasi yang dilakukan Diskominfo dalam penyebaran informasi sebagai pelayanan informasi publik.
- b) Diskominfo Kabupaten Bulungan memiliki sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur jaringan yang belum optimal. Ini disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang kurang kompeten dan dukungan anggaran masih membatasi pelaksanaan program serta kepedulian masyarakat yang masih rendah

- c) Banyak manfaat yang bisa dirasakan dalam pelayanan informasi publik baik secara offline maupun online yang dilakukan oleh Diskominfo selama penerapan e-government sudah di laksanakan secara maksimum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah itu sendiri, begitu juga masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas sebagai model studi kasus yang dipilih oleh peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan sehingga harapan kedepan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti hal yang sama dan lebih dalam lagi dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan yang ada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Diskominfo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Huda, Irkham. "Research & Learning in Primary Education Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Terhadap Kulaitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar." Asmar 2, no. 1 (2020): 121–25.

Indrajit, Richardus Eko. "Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet Dan Teknologi Informasi," 2006, 1–93.

Rosalina, Iga. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Karangrejo Kabupaten Magetan." Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Surabaya 1 (2012): 0–216.

Sirajuddin, Sitti Mirsa, and A . Atrianingsi. "Kepercayaan Publik (Publik Trust) Terhadap E-Government : Studi Kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan Di Kota Makassar." Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) 9, no. 1 (2020): 80.

Taufiqurokhman. "Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan," 2008, 1–106.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bulungan (2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. SUMBER LAIN

"√ Efektivitas Adalah - Pengertian Menurut Para Ahli & Contoh." Accessed September 29, 2021. <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>.

“Apa Pentingnya Perencanaan Dalam Manajemen? - Prodi Administrasi Publik Terbaik Di Sumatera Utara.” Accessed March 31, 2022. <http://adminpublik.uma.ac.id/2021/02/09/apa-pentingnya-perencanaan-dalam-manajemen/>.

“Badan Pusat Statistik.” Accessed September 9, 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1750/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi--ip-tik--indonesia-tahun-2019-sebesar-5-32-pada-skala-0---10.html>.

George R. Terry. Dasar Dasar Manejemen, 2013. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab2.pdf?sequence=11>.

“Pengertian Perencanaan, Tujuan Perencanaan, Prinsip Perencanaan, Filosofi Perencanaan Program | Barenlitbangda Kota Banjarmasin.” Accessed September 22, 2021. <https://renlitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html>.

